

JURNAL SKRIPSI
DAMPAK IMPLEMENTASI *INDONESIA - AUSTRALIA*
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2011 – 2022



Enrico Geraldo Girsang

L1A018037

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM

2023

**DAMPAK IMPLEMENTASI INDONESIA-AUSTRALIA
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
TERHADAP PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA TAHUN 2011 –
2022**

**ENRICO GERALDO GIRSANG
L1A018037**

**FAKULTAS ILMU HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS
MATARAM**

ABSTRAK

Tujuan-tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk memahami dampak implementasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan nasional Indonesia pada tahun 2011 hingga 2022, 2. Untuk menganalisis dampak implementasi IA-CEPA, 3. Untuk melihat sejauh mana institusi-institusi internasional antara Indonesia dan Australia mampu untuk mempengaruhi pembangunan nasional Indonesia, terutama bagi pembangunan nasional berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis (kuantitatif). Dalam metodologi penelitian, ada pendekatan penelitian, identifikasi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data menggunakan bantuan program aplikasi komputer SPSS, uji instrumen yang terdiri dari uji regresi linier berganda dan uji hipotesis analisis data. Dampak implementasi dari IA-CDPA kepada pembangunan nasional Indonesia pada tahun 2011 hingga 2022 memberikan hasil yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Rekomendasi dari peneliti, adalah untuk pemerintah Indonesia agar mempersiapkan skema antisipasi untuk mengantisipasi terjadinya produk-produk impor Australia terserap pada industri-industri yang berorientasi domestik dan konsumsi rumah tangga yang akan berpengaruh terhadap *trade off* di produk-produk industri lokal. Salah skema yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun strategi *non-tariff measures* (NTMs), terutama pada sektor pertanian. Kerjasama IA-CEPA pada bidang pembangunan manusia Indonesia harus mulai difokuskan kepada kesenjangan sosial di Indonesia Wilayah Timur.

Kata Kunci: IA-CEPA, Produk Domestik Bruto, Indonesia, Australia, Pembangunan Nasional Berkelanjutan.

ABSTRACT

INDONESIA-AUSTRALIA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT IMPLEMENTATION IMPACT ON INDONESIA NATIONAL DEVELOPMENT IN 2011 - 2022

The aims for this research are 1. to understand Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) implementation impact to Indonesia national economic, social, and environmental development in 2011 – 2022, 2. To analyze IA-CEPA Implementation Impact, 3. To see how far international institutions between Indonesia and Australia can influence Indonesia national development, primarily for sustainable national development. This research uses positivist approach (quantitative). In the research methodology, there are research approach, variables identification, data collection techniques, data processing techniques using SPSS application program aids, instrument test consisting of multiple linear regression tests and data analysis hypothesis tests. Implementation Impact of IA-CEPA to Indonesia national development in 2011 – 2022 gives significant and positive results to Indonesia gross domestic products. Recommendation by the researcher, is for the government of Indonesia to prepare an anticipation scheme for anticipating import products from Australia being absorbed to industries that have domestic orientation and household consumption that will effects to trade off in local industrial products. One of the scheme is by arranging effective non-tariff measures (NTMs) strategy, specifically for agricultural sector. IA-CEPA partnership in Indonesia human development subject should start to focus on social gap in Eastern Indonesia Territory.

Keywords: IA-CEPA, Gross National Product, Indonesia, Australia, Sustainable National Development

I. PENDAHULUAN

Perdagangan bebas antara negara-negara merupakan fenomena yang semakin penting dalam era globalisasi ini. Peningkatan hubungan ekonomi antara negara-negara, termasuk implementasi perjanjian perdagangan bebas, memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan nasional suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara lain, termasuk Australia. Perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia telah menjadi topik yang menarik minat banyak peneliti dan praktisi di bidang ekonomi dan hubungan internasional. Kedua negara memiliki ikatan ekonomi yang kuat dan terlibat dalam berbagai kerjasama bilateral dan multilateral. Implementasi perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia dapat membawa konsekuensi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi, investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan sektor-sektor tertentu di Indonesia.

Pada penelitian ini, penulis memfokuskan penelitiannya pada kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia sebagai bentuk pelaksanaan perdagangan bebas Indonesia dan Australia bagi pembangunan nasional Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama FTA (*Free Trade Agreement*) antara Indonesia dan Australia adalah dengan dibentuknya perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia yaitu IA-CEPA (*Indonesia Australia Comprehensive*

Economic Partnership Agreement). Kerjasama bilateral tersebut dibentuk dengan dasar hubungan baik antara Indonesia dan Australia pada kerjasama-kerjasama internasional sebelumnya, seperti pembentukan AANZFTA (*Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*) di Hua Hin pada tanggal 27 Februari 2009, sama-sama menjadi anggota APEC (*Asia-Pacific Economic Cooperation*). IA-CEPA ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia Enggartiasto Lukita dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham dengan disaksikan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla pada tanggal 4 Maret 2019.¹ IA-CEPA diratifikasi Parlemen Australia tanggal 26 November 2019 dan diratifikasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia tanggal 6 Februari 2020 dengan diterbitkannya Undang Undang No.1 tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.² Namun pelaksanaan dari IA-CEPA secara resmi dieksekusi pada tanggal 5 Juli 2020.³

Berlakunya IA-CEPA didukung dengan diterbitkannya tiga peraturan pelaksana yaitu: a). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Ketentuan Asal Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia. b) Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.10/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan

¹ Free Trade Agreements Center, "IA-CEPA", <https://ftacenter.kemendag.go.id/ia-cepa>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

² Asean Briefing, "Indonesia and Australia Ratify IA-CEPA Agreement", <https://www.aseanbriefing.com/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

³ Ekonomi Bisnis, "Mulai Berlaku 5 Juli, Ini Manfaat IA-CEPA Bagi Indonesia", <https://ekonomi.bisnis.com/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2023.

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. c) Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

Perjanjian tersebut mencakup kesepakatan perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia dengan menghapuskan bea masuk hampir semua produk yang diperdagangkan antara kedua negara, mempermudah perusahaan Australia untuk berinvestasi di Indonesia, dan meningkatkan jumlah WNI yang diperbolehkan untuk pergi ke Australia untuk pelatihan vokasi.

IA-CEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi yang komprehensif antara Indonesia dengan Australia dengan prinsip dasar kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win*) dalam jangka panjang. Kemitraan ini diarahkan membentuk “*economic power house*” di kawasan dengan mengkombinasikan kekuatan kedua negara. IA-CEPA ini berbeda dengan FTA antar negara yang umumnya hanya berfokus pada perjanjian perdagangan dan jasa, sedangkan IA-CEPA adalah kemitraan komprehensif yang juga mencakup investasi, kerjasama ekonomi yang lebih luas serta pengembangan sumber daya manusia sehingga kedua negara dapat tumbuh bersama memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menciptakan kekuatan ekonomi baru di kawasan tersebut.

Ketentuan dalam IA-CEPA akan meningkatkan akses pasar untuk barang dari kedua negara dengan mengurangi hambatan teknis perdagangan. Salah satu keuntungan IA-CEPA bagi Indonesia, antara lain dihapuskannya bea masuk impor seluruh pos tarif Australia (6474 pos tarif) menjadi nol persen diiringi

peningkatan standar produk Indonesia untuk memenuhi standar produk Australia. Sebagai imbalannya, Australia juga dapat mengekspor 99% barangnya ke Indonesia tanpa bea masuk. Selain itu, IA-CEPA juga mengatur perlakuan terhadap layanan dan investasi serta perdagangan digital. “Hal ini merupakan hasil positif, karena berarti seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia tidak dikenakan bea masuk”.⁴

Sebenarnya hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Australia diibaratkan seperti *roller-coaster* yang berfluktuasi dan sulit.⁵ Hubungan bilateral di antara keduanya sebenarnya cukup stabil dalam waktu yang lama jika dilihat kembali dari sejarah Australia dan Indonesia, meski memang sempat mengalami instabilitas pada beberapa peristiwa tertentu. Sementara itu, kedua belah pihak memandang Indonesia sebagai mitra yang lebih lemah. Namun, dinamika hubungan ini sekarang bergeser karena pertumbuhan Indonesia yang kemudian menjadi kekuatan regional. Indonesia kini sepuluh kali lipat lebih padat daripada Australia dengan jumlah penduduk mencapai 24 juta jiwa. Selain itu, ekonomi Indonesia sekarang 30% lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Australia dalam hal *Purchasing Power Parity* (PPP) disebabkan kelas menengah Indonesia lebih besar dari seluruh populasi Australia. Maka dari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia dapat mengimbangi dalam hubungan bilateral tersebut dengan menjadi mitra yang lebih kuat. Bahkan, pemisahan daratan Indonesia dan Australia yang hanya berjarak 240 kilometer laut membuat

⁴ Enggartiasto, Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat, www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-australia-masuki-babak-baru-hubungan-bilateral-perjanjian-dagang-ia-cepa-ditandatangani

⁵ Roberts, C. B., & Habir, A. D. (2015). *Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential*. London: Palgrave Macmillan, http://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137397416_10

kedua negara tersebut memiliki saling ketergantungan keamanan yang kuat. Tidak hanya itu, kedekatan tersebut juga memberikan efisiensi tambahan dan potensi hubungan ekonomi di masa depan.⁶ Kedua pemerintah sama-sama menyadari betul betapa pentingnya peran masing-masing negara satu sama lain.

IA-CEPA mencakup poin-poin mengenai perdagangan bebas bilateral, investasi, visa pelatihan kerja, arbitrase antara investor, perdagangan elektronik, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam perjanjian IA-CEPA, perusahaan-perusahaan Australia diperbolehkan untuk memegang mayoritas saham perusahaan-perusahaan Indonesia yang bergerak di sektor telekomunikasi, transportasi, kesehatan dan energi. Jumlah visa liburan dan kerja (*Working Holiday Visa*) yang akan dikeluarkan Australia untuk WNI akan ditingkatkan dari 1.000 ke 4.100 per tahun, dan 5.000 pada tahun 2026. Universitas-universitas Australia juga akan diperbolehkan untuk membuka kampus cabang di Indonesia.

Menurut penelitian ISP (Indeks Spesialisasi Produk), Indonesia masih cenderung importir. Di sisi lain di bidang manufaktur, Indonesia lebih cenderung eksportir. Hal ini menandakan Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan.

Di sektor kesehatan, IA-CEPA harus dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang menguntungkan bagi pembangunan kesehatan di Indonesia meskipun di implementasikan saat pandemic COVID-19. Dalam perjanjian perdagangan IA-CEPA terdapat 3 kesepakatan sektor kesehatan diantaranya akses pasar di layanan jasa kesehatan, *Side Letter Economic Cooperation* dan *Side Letter on Improving Health Professional Standards and Access to Health Services*. Dengan dasar

⁶ Chapra, M. U. (2001). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam. Gema Insani

prinsip saling menghormati dan menguntungkan, Kemenkes berupaya memanfaatkan IA-CEPA untuk memperjuangkan pengakuan standar dan kompetensi Tenaga Kesehatan serta produk Alkes dan Farmasi yang setara antara Indonesia dan Australia.

Sementara pada sektor farmasi dan alat kesehatan, Kemenkes diharapkan bisa memanfaatkan hambatan non-tarif untuk mendorong arus investasi bagi industri Farmasi dan Alat Kesehatan menuju kemandirian Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Di sektor pendidikan, implementasi IA-CEPA diharapkan dapat mempercepat penyediaan TVET (*Technical and Vocational Education and Training*) di sektor-sektor keterampilan utama melalui mekanisme ‘*clearing house*’ sekaligus mendukung partisipasi tenaga kerja perempuan dalam dunia kerja. Salah satu indikasi dari sebuah peningkatan kerjasama bilateral di bidang pendidikan adalah jumlah mahasiswa yang melanjutkan studi, baik di Indonesia maupun di Australia.

Di sektor pengembangan sumber daya manusia, IA-CEPA diharapkan berhasil meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan tenaga kerja Indonesia melalui program pertukaran keterampilan timbal balik, pelatihan kerja di tempat kerja, serta aturan visa bekerja dan liburan.

Di sektor pengembangan sumber daya alam, IA-CEPA melihat bahwa komoditas ekspor dan impor Indonesia dan Australia cenderung sama, yaitu di bidang sumber daya alam telah membuka potensi bagi kedua negara bahwa dengan konsep *economic power house* kemungkinan Indonesia dan Australia

memasuki *global value chain* akan lebih besar dibandingkan negara ini berdiri sendiri tanpa kerjasama satu sama lain.

Implementasi perdagangan bebas antara Indonesia dan Australia memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia. Jadi penelitian ingin menganalisis tentang bagaimana dampak IA-CEPA terhadap pembangunan nasional Indonesia dalam skripsi yang berjudul “Dampak Implementasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* Terhadap Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2011-2022”.

II. PEMBAHASAN

Peranan Australia terhadap pembangunan di Indonesia

Sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia mempunyai banyak kesamaan, baik pada tingkat pribadi maupun politik. Australia adalah salah satu negara pertama yang mengakui Republik Indonesia. Hubungan ini bahkan mendahului pengakuan resmi PBB terhadap Republik Indonesia dan bertindak sebagai utusan Indonesia pada Komisi Jasa Baik PBB yang merundingkan pengakuan PBB pada Desember 1949. Pada 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer yang direncanakan terhadap Republik yang masih muda ini di Jawa dan Sumatera. Sepuluh hari kemudian, Australia mengambil langkah diplomatik yang krusial dan merujuk konflik di Indonesia kepada Dewan Keamanan PBB sebagai pelanggaran terhadap perdamaian berdasarkan Pasal 39 (Bab VII) Piagam PBB. Pada tanggal 27 Desember 1949, ketika Belanda mengalihkan kedaulatan ke Republik Indonesia Serikat. Pada hari yang sama, Pemerintah Australia mengakui negara baru bernama Indonesia tersebut. Setelah dukungan yang diberikan oleh pemerintah Australia terhadap bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan kedaulatan bangsa Indonesia dari Belanda, kembali terjadi guncangan antara Indonesia dengan Australia dalam kaitannya dengan masalah Irian Barat. Hal ini sedikit banyak berpengaruh terhadap hubungan keduanya.

Hubungan Australia dengan Indonesia mulai membaik saat terjadi pergantian pemerintahan di Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Australia segera bergabung dalam *Inter-Governmental Group*

on Indonesia (IGGI), sebagai kelompok negara-negara donor yang dibentuk khusus untuk membantu pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk membangun kembali kontak yang baik, Menteri Luar Negeri Australia Paul Hasluck membuat dua kunjungan ke Indonesia yaitu pada tahun 1966 dan 1967. Australia juga memberi bantuan ekonomi kepada Indonesia.

Bantuan Australia terus berlanjut dan alirannya semakin meningkat. Pada bulan Desember 1970 Menteri Luar Negeri Australia William McMahon, pada kunjungannya kepada Menteri Perdagangan Indonesia Dr. Soemitro Djohadikusumo, mengumumkan dukungan bantuan sipil untuk proyek Indonesia yang bernilai lebih dari \$ 11 juta.

Antara tahun 1972-1988, hubungan Australia dan Indonesia diwarnai oleh beberapa masalah yang mengganggu yaitu isu Timor Timur. Akibatnya, hubungan kedua negara memburuk antara tahun 1980-1983. Bahkan pemerintah Indonesia mengambil langkah keras menutup kantor perwakilan media Australia ABC (*Australian Broadcasting Corporation*) di Jakarta.

Akan tetapi pada 15 tahun terakhir sebelum terkena krisis moneter 1997-1998, Indonesia memberi kesan khusus di bidang ekonomi di antaranya adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kesempatan kerja yang diciptakan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut. Khusus hubungan perdagangan bilateral Indonesia dan Australia, nilainya telah mencapai 3 miliar dollar Australia atau sekitar 462 triliun rupiah. Ekspor Australia ke Indonesia pun mengalami peningkatan tiga kali lipat selama pemerintahan Paul Keating.

Kebanyakan ekspor Indonesia masih berupa minyak bumi sedangkan impor

berupa gandum dan kapas di samping juga minyak bumi. Pertumbuhan ekspor ke Australia lebih cepat dari ekspor Australia ke Indonesia. Pada Juni 1994 Australia melakukan promosi dagang dan kebudayaan (*Australia Today Indonesia*) disingkat ATI'94 yang merupakan kesempatan emas pertama bagi banyak perusahaan Australia untuk dapat memasuki pasar Indonesia, yang telah mereka usahakan dengan bersemangat. Dalam peristiwa itu digelar pula suatu konferensi bisnis yang menarik hampir seribu peserta baik dari Australia maupun Indonesia. Banyak diantara perusahaan-perusahaan tersebut melanjutkan dan mendorong kesempatan yang didapat dari cara pemasaran yang efektif ini. Peristiwa ini membuat serangkaian bisnis yang berkelanjutan. Sejak tahun 1998 sampai era 1990-an telah terjalin kerja sama sedikitnya 12 perjanjian antara kedua negara. Perjanjian tersebut antara lain mencakup ekstradisi tentang penangkapan, penukaran dan penyerahan pelanggar hukum dari Indonesia ke Australia dan sebaliknya.

Dalam sektor sumber daya alam, kini Indonesia mengakui Australia sebagai salah satu pemasok dunia yang terkemuka dari keahlian dan perlengkapan tambang yang paling modern. Indonesia sekarang memandang Australia sebagai suatu negara tambang dan bukan hanya negara yang menghasilkan barang-barang mineral. Negara Australia mungkin merupakan negara produsen paling kompetitif di seluruh dunia dalam memproduksi hasil-hasil pertanian, mineral dan energi.

Neraca Perdagangan Indonesia-Australia

Jauh sebelum implementasi IA-CEPA defisit neraca perdagangan Indonesia ke Australia semakin melebar dan terus membengkak sampai tahun 2019. Pada

awalnya Indonesia mengklaim IA-CEPA yang secara resmi dieksekusi pada tanggal 5 Juli 2020 dimaksudkan untuk mendorong kerjasama bilateral yang saling menguntungkan, diantaranya:

- a. Membentuk “*Economic Power House*”.

Indonesia dan Australia diharapkan mampu bertukar komoditas mentah untuk mengembangkan produksi dengan tujuan re-ekspor ke negara ketiga.

- b. Akses pasar komoditas Australia dengan penurunan 6474 pos tarif hingga 0%, khususnya untuk produk otomotif, tekstil dan garmen, herbisida dan pestisida, elektronik, permesinan, karet dan turunannya, kayu dan turunannya, kopi, coklat dan kertas.

Selama tahun 2012-2019 sebelum pelaksanaan IA-CEPA, neraca perdagangan Indonesia ke Australia sudah defisit terus, yang artinya impor Indonesia dari Australia lebih besar daripada ekspor Indonesia ke Australia.

Defisit neraca perdagangan 2020-2022 semakin tambah negatif dan melebar. Dari telaah ini secara mudah dapat disimpulkan bahwa prioritas utama adalah bukan mendorong penurunan pos tarif, tetapi mendorong kemampuan eksportir Indonesia untuk bisa memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan Australia. Pertanyaannya berikutnya, relevankah IA-CEPA dijadikan agenda prioritas dalam konteks perdagangan, sebelum ada pembenahan dan peningkatan signifikan pada kapasitas industri domestik yang memenuhi standar Australia? Penurunan hambatan pos tarif memang diperlukan untuk memacu semangat ekspor, tapi memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan Australia akan lebih

krusial untuk diperhatikan oleh para eksportir Indonesia.

Mengutip dari *Trade Map* potensi ekspor yang belum termanfaatkan oleh Indonesia di pasar Australia hanya senilai 201 Juta US\$, sebaliknya potensi ekspor Australia ke Indonesia yang belum termanfaatkan sebesar 1 Milyar US\$ atau hampir 5 kali lipat dari tambahan potensi ekspor Indonesia⁷. *Trade Map* adalah portal yang dikembangkan oleh *International Trade Centre* UNCTAD/WTO (ITC), portal ini menjadi sebuah solusi para eksportir untuk melakukan riset pasar, identifikasi potensi pasar, hingga diversifikasi produk.

Peluang ekspor Indonesia ke Australia yang belum termanfaatkan diantaranya; kendaraan bermotor yang nilai aktual ekspornya baru 1% saja yaitu senilai 1.6 Juta US\$ dari yang seharusnya mencapai 201,6 Juta US\$,. Kertas untuk rumah tangga dan sanitasi masih berpotensi meningkat 39,5 Juta US\$ dengan pemanfaatan hanya 51%. Plywood dan laminated wood masih ada peluang 35,8 Juta US\$ yang termanfaatkan hanya 53% atau, Kertas koran dan percetakan ada potensi 40.6 juta yang belum termanfaatkan atau baru 45% saja. Sedangkan peluang ekspor Australia ke Indonesia yang belum termanfaatkan diantaranya, biji gandum senilai 1 Miliar US\$ dimana pemanfaatannya baru 51%, Sapi hidup baru termanfaatkan 68% saja atau senilai 236 Juta US\$, Daging sapi pemanfaatannya baru 35% atau senilai 327 Juta US\$, Tembaga senilai 277 juta US\$ dan Kapas 179 US\$ dan lain-lain.

Faktanya memang pemerintah Indonesia mesti lebih selektif dalam mengelola potensi ekspor pasca IA-CEPA. Banyak yang harus diantisipasi

⁷ Trade Map Adalah Solusi Ekspor Kian Tepat Sasaran, link: <https://exporthub.id/trade-map-adalah-solusi-ekspor-kian-tepat-sasaran/>

dampaknya terhadap serbuan ekspor Australia. Salah satu contohnya impor daging sapi dan sapi hidup perlu diantisipasi sedemikian rupa agar tidak mematikan potensi sapi lokal, sebaliknya ekspor sediaannya digunakan untuk melakukan perbaikan kualitas bibit sapi yang dalam jangka panjang mampu mendorong swasembada daging sapi secara nasional. Di sisi lain, impor gandum, tembaga, kapas dan produk-produk bahan baku untuk industri olahan perlu dikelola sedemikian rupa agar mampu memperbaiki daya saing industri pengolahan nasional untuk kepentingan substitusi impor maupun industri bertujuan *re-export*.

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Ukuran keberhasilan pembangunan bagi negara-negara di dunia saat ini tidak lagi hanya dinilai dari besarnya Produk Domestik Bruto (PDB) yang mereka miliki, tetapi juga dari seberapa berhasil mereka dalam membangun kualitas sumber daya manusia masyarakatnya yang tecermin melalui indeks pembangunan manusia (IPM). Dalam perspektif UNDP pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*) yang diartikan sebagai proses upaya ke arah perluasan pilihan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan tingkat kesehatan, pengetahuan dan keterampilan sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan /keterampilan tersebut. Konsep ini jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep pertumbuhan ekonomi. Konsep pembangunan manusia UNDP mengandung

empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan pembangunan tentang penduduk (*of people*), untuk penduduk (*for people*) dan oleh penduduk (*by people*).

Sumber data untuk penghitungan IPM diperoleh dari sensus dan survei yang dilakukan oleh BPS. Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) diperoleh dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Survei Penduduk Antar sensus 2015 (SUPAS 2015). Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). IPM terus mengalami peningkatan meskipun dengan pertumbuhan yang melambat.

Pada rentang waktu 2020-2022 atau dapat dikatakan setelah rilis perjanjian IA-CEPA terdapat 2 provinsi di Indonesia dengan capaian IPM “sangat tinggi” ($IPM \geq 80$), yakni Provinsi DIY Yogyakarta dan DKI Jakarta. Selain itu, terdapat 21 provinsi dengan kategori IPM “tinggi” (capaian $70 \leq IPM < 80$) dan 11 provinsi dengan kategori IPM “sedang” (capaian $60 \leq IPM < 70$), serta tidak ada provinsi dengan status pencapaian manusia yang “rendah”.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia

Pengelolaan sumber daya alam atau SDA, tidak akan lepas dari kerangka pembangunan berkelanjutan. Apa yang dilakukan generasi saat ini tidak boleh mengorbankan kemampuan alam untuk dapat mencukupi kebutuhan generasi yang akan datang. SDA Indonesia merupakan obyek menarik dan diperebutkan oleh ragam kepentingan. Oleh karena itu, *magnitude* tantangan mengelolanya juga tinggi. Ditengah upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan ekonomi

guna menciptakan masyarakat yang sejahtera, terdapat permasalahan yang dapat mengancam aktifitas perekonomian secara global, yaitu dengan adanya pemanasan global dan perubahan iklim. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia, dengan sektor pertanian menjadi sektor yang paling terdampak perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan naiknya permukaan air laut yang dapat berdampak pada aktifitas perekonomian dengan estimasi pada tahun 2100 menyebabkan kerugian PDB sebesar 0,3% hingga 9,3%⁸.

Indonesia pun tidak terhindarkan dari dampak perubahan iklim tersebut, penelitian menunjukkan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan suhu 0,8°C pada tahun 2030, selain itu pola curah hujan juga akan berubah⁹. Pertumbuhan PDB akan menjadi negatif yang disebabkan oleh dampak buruk perubahan iklim pada pertanian dan agroindustri. Lingkungan sebagai modal alam memberikan kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan

Secara nasional, IKLH berada dalam kategori cukup baik dari tahun 2011-2019. Namun, jika dilihat dari wilayah Indonesia kondisi lingkungan hidup bervariasi, dimana wilayah yang berada dalam kawasan Indonesia bagian barat terutama pulau Jawa yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB Indonesia justru memiliki kondisi kualitas lingkungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan wilayah yang berada pada kawasan Indonesia bagian timur.

⁸ Asuncion, C., R & Lee, M. (2017). *Impact of Sea Level Rise on Economic Growth in Developing Asia. ADB Working Paper Series*, No 507.

⁹ Oktaviani, R., Amaliah, S., Ringler, C., Rosegrant, M.W., & Sulser, T.B. (2011). *The impact of global climate change on the Indonesian economy. IFPRI Discussion Paper 1148. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.*
[Link: ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/126762](http://link.ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/126762)

Pengaruh Neraca Perdagangan Indonesia-Australia Terhadap PDB Indonesia

Tidak terdapat pengaruh signifikan Neraca Perdagangan Indonesia-Australia terhadap PDB Indonesia. Hal ini masuk akal karena data Kementerian Perdagangan menunjukkan bahwa sejak 2012-2022, Indonesia selalu mencatat defisit berdagang dengan Australia bahkan semakin melebar. Sebagai contoh neraca perdagangan total Indonesia ke seluruh mitra global tahun 2022 adalah 529,351.4 juta US\$¹⁰, sedangkan Neraca Perdagangan Indonesia-Australia pada tahun yang sama justru defisit -6396.9 juta US\$. Ini konsekuensi logis, karena pendapatan per kapita (*per capita income*) Australia yang lebih tinggi. Jadi sulit bagi produk Indonesia untuk bersaing. Konsumen Australia mencari produk berkualitas tinggi atau *high end product*. Sedangkan ekspor Indonesia hanya dominan produk komoditas.

Jika dikaji dari 2 kesepakatan IA-CEPA yaitu : membentuk “*Economic Power House*” dan penurunan 6474 pos tarif Australia hingga 0% agaknya Indonesia belum siap memanfaatkannya. Salah satu contohnya adalah industri makanan olahan berbahan dasar gandum seperti pasta dan mi instan yang bahan bakunya berasal Australia dan diperoleh dengan harga lebih terjangkau senilai 1 Miliar US\$ ternyata pemanfaatannya baru 51% untuk menysasar re-ekspor akses pasar ke negara ketiga. Fakta lainnya, ternyata penurunan 6474 pos tarif hingga 0% tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Australia karena hambatan perdagangan Indonesia ke Australia sebenarnya lebih banyak

¹⁰ Neraca Perdagangan Indonesia, link: <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-indonesia>

dipengaruhi oleh faktor non-tarif, diantaranya standarisasi produk. Standardisasi tidak bisa dilepaskan dalam perdagangan antar negara, terlebih ada perbedaan standar antara Indonesia (SNI) dan standar di Australia (SA). Aspek penilaian kesesuaian (*conformity assessment*) juga perlu diperhatikan, yaitu mengenai saling pengakuan dan keberterimaan atas hasil pengujian dan sertifikasi suatu produk dan jasa.

Pengaruh IPM Indonesia Terhadap PDB Indonesia

Terdapat pengaruh signifikan IPM Indonesia terhadap PDB Indonesia. Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. IPM terus mengalami peningkatan rata-rata pertahun sekitar 0,89%. Australia sebagai tetangga dekat telah lama berkomitmen membantu Indonesia mengatasi kemiskinan, menurunkan angka kematian, pendidikan, infrastruktur dan perlindungan sosial melalui lembaga bantuan internasional Australia (AusAID). Beberapa program kemitraan Australia yang telah diluncurkan dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang inklusif antara lain: a). Kemitraan Indonesia-Australia untuk Perekonomian (Prospera) Australia menyediakan saran untuk Pemerintah Indonesia memperbaiki pembelanjaan, meningkatkan pendapatan, memperbaiki sektor finansial, dan meningkatkan efisiensi pasar. b) Kemitraan Australia-Indonesia untuk Infrastruktur (Kiat) Australia menyediakan saran teknis dalam bidang reformasi kebijakan dan peraturan, persiapan proyek, pendanaan dan penyelesaian, untuk mendorong investasi sektor swasta yang lebih besar dalam infrastruktur. c) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)

Australia membantu Indonesia mencapai target penyediaan air bersih dan sanitasi untuk warga Indonesia, dengan mendorong investasi dalam infrastruktur air dan sanitasi oleh pemerintah daerah. d) Kemitraan Australia-Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi Pedesaan (AIP-Rural) Australia dan Indonesia bekerja bersama dalam sektor pertanian untuk memperbaiki produktivitas dan meningkatkan pendapatan. Pekerjaan ini melibatkan pertukaran pengetahuan teknis dan inovasi serta kemitraan penting dengan pelaku bisnis untuk meningkatkan pendapatan petani melalui kegiatan sektor swasta. e) Australia Awards di Indonesia (AAI) Australia menyediakan beasiswa paska sarjana jangka pendek dan panjang di universitas-universitas Australia dan memastikan mereka tetap terhubung dengan Jejaring Alumni Australia Global. f) Inovasi untuk Anak Sekolah Indonesia (Inovasi) Australia bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memahami apa yang paling berhasil di tingkat daerah dan memperbaiki hasil pembelajaran melek huruf dan melek angka. g) Kemitraan Australia-Indonesia untuk Penyakit Menular yang Baru Muncul (AIP-EID) Australia bekerjasama untuk memberantas penyakit-penyakit menular yang baru muncul dan menurunkan malnutrisi pada perempuan hamil dan anak-anak serta mendukung Departemen Pertanian dan Sumberdaya Air Australia untuk meningkatkan tata kelola kondisi darurat kesehatan hewan di Indonesia. h) Pemberdayaan Perempuan Indonesia untuk Pengentasan Kemiskinan (Mampu) Australia mendukung organisasi masyarakat madani untuk mendorong reformasi kebijakan dan memperbaiki akses perempuan miskin, perlindungan sosial, kondisi pekerjaan (termasuk pekerja migran di luar negeri), kesehatan dan nutrisi, serta

mengurangi kekerasan terhadap perempuan. i) Menuju Masyarakat Indonesia Yang Kokoh Sejahtera (Mahkota) Australia mendukung Tim Nasional untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Indonesia, yang dikenal sebagai TNP2K, untuk memperkuat program-program nasional yang mendukung rumah tangga termiskin dan paling rentan. j) Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kebijakan yang Berpihak pada Kaum Miskin (KSI) Australia mendukung kebijakan berbasis bukti yang lebih baik dengan meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga penelitian kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, dan memperkuat minat dan kapasitas badan-badan Pemerintah Indonesia dalam menggunakan bukti ini. KSI mendukung reformasi lingkungan yang menunjang, termasuk pengadaan penelitian.

Kajian Tahunan Keefektifan Bantuan Pembangunan Australia (*Government's Comprehensive Aid Policy Framework = CAPF*) yang dirilis tiap awal tahun menunjukkan bahwa bantuan Australia sudah efektif dan menghasilkan perubahan yang nyata¹¹.

Pengaruh IKLH Indonesia Terhadap PDB Indonesia

Tidak terdapat pengaruh signifikan IKLH Indonesia terhadap PDB Indonesia. Maksudnya adalah variabel IKLH Indonesia ini tidak perlu diinterpretasikan terhadap PDB Indonesia karena memang tidak berpengaruh terhadap PDB Indonesia, bahkan variabel ini juga boleh dikeluarkan dari model. Atau dengan kata lain hipotesis H₃: diduga IKLH Indonesia berpengaruh positif

¹¹ Kedutaan Besar Australia, link: https://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM13_017.html

signifikan terhadap PDB Indonesia diterima. Jadi semakin tinggi nilai indeks KLH Indonesia yang dicapai maka akan mampu meningkatkan PDB Indonesia.

Kondisi ini jika dikaitkan dengan Kurva Kuznets Lingkungan tidak terbukti mengikuti hipotesis kurva U terbalik, tapi lebih berbentuk hubungan linier. Artinya peningkatan PDB dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia pada periode waktu penelitian (2011-2022) tidak sampai mendegradasi lingkungan hidup. Dengan kata lain, dampak pembangunan nasional yang masih terkontrol dan tidak merusak alam Indonesia secara keseluruhan.

Dalam hal lingkungan hidup, kerjasama Indonesia-Australia tergolong intens sekali karena mereka menyadari berada pada kawasan Asia-Pasifik yang sama dan memiliki kepedulian yang mendalam terhadap hal tersebut. Kerusakan lingkungan disatu negara akan berdampak pada negara tetangganya. Indonesia-Australia bersama negara-negara Asia Pasifik telah mengadakan kerjasama *Asia Pacific Rainforest Summit (APRS)* yang menghasilkan banyak kesepakatan untuk penyelamatan hutan hujan kawasan ini. 1st APRS diadakan tahun 2014 di Sydney, Australia. 2nd APRS diadakan tahun 2016 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. 3rd APRS diadakan tanggal 23-25 April 2018 di Yogyakarta, Indonesia.

Selain itu, Indonesia-Australia sepakat mengagendakan kerja sama dalam hal pengelolaan gambut, mangrove, serta sampah plastik laut. Indonesia-Australia juga telah melakukan kerjasama dalam bidang penghitungan karbon yang akhirnya tertuang dalam *Indonesia National Carbon Accounting System (INCAS)*, yang merupakan sistem pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV) dari Gas

Rumah Kaca (GRK), termasuk aktivitas REDD+. Indonesia ingin meneruskan kerjasama dengan pihak Australia terutama dalam bidang sistem pengukuran karbon kredit karena Australia dan New Zealand telah mengimplementasikan pengukuran tersebut. Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 29% pada 2030 dan dengan dukungan internasional target tersebut menjadi 4%, dimana penurunannya ditargetkan sebesar 17% dari kehutanan termasuk dari *blue carbon forest* terutama mangrove, sementara 11% penurunan dilakukan melalui sektor energi.

Dalam hal perubahan iklim dan tata kelola lingkungan, Indonesia-Australia berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari konversi lahan. Hal ini termasuk membantu mengatasi penyebab kebakaran hutan dan lahan melalui praktik pengelolaan lahan yang lebih baik, meningkatkan investasi pada energi bersih, pertanian cerdas iklim, dan inisiatif pertumbuhan hijau.

Australia mendukung penuh upaya Indonesia melaksanakan operasional *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* untuk menerapkan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan lestari, serta tata kelola lingkungan dan karbon. *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* sendiri adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Kebijakan ini lahir sebagai bentuk keseriusan Indonesia dalam rangka mengurangi emisi GRK serta mengendalikan perubahan iklim yang terjadi beserta dampaknya.

Pengaruh Neraca Perdagangan Indonesia-Australia, IPM Indonesia dan IKLH Indonesia Terhadap PDB Indonesia.

Neraca Perdagangan Indonesia-Australia, IPM Indonesia dan IKLH Indonesia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Maksudnya adalah jika ketiga variabel secara simultan mengalami peningkatan maka variabel PDB Indonesia juga akan mengalami peningkatan.

Walaupun defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia masih sangat lebar, tapi dalam jangka panjang masih memberi harapan. Masih banyak lahan ekspor yang belum digarap sambil membenahi standar industri yang dipersyaratkan Australia. Industri Indonesia harus bisa “naik kelas” untuk bisa masuk pasar Australia yang menjanjikan.

Di sisi lain, kerjasama Indonesia-Australia dalam berbagai program sosial dan percepatan pengentasan kemiskinan tidak dapat dipungkiri telah menaikkan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Demikian pula kerjasama dalam tata kelola lingkungan hidup dari kehutanan sampai efek rumah kaca telah mengantarkan Indonesia pada keseimbangan pembangunan nasional berkelanjutan tanpa merusak alam. Jangan sampai Indonesia menjadi Nauru kedua, negara kaya di Pasifik yang bangkrut akibat tidak bisa mengelola Sumber Daya Alam serta keuangannya.

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai Dampak Implementasi *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* Terhadap Pembangunan Nasional Indonesia Tahun 2011-2022, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Neraca Perdagangan Indonesia-Australia tahun 2011-2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia tahun 2011-2022. Defisit Neraca Perdagangan Indonesia-Australia sampai batas tertentu belum mengganggu PDB Indonesia. Akan tetapi kehadiran IA-CEPA justru akan memperdalam defisit perdagangan antara Indonesia dan Australia karena potensi ekspor yang belum dimanfaatkan oleh Indonesia di pasar Australia hanya senilai 201 Juta US\$, sebaliknya potensi ekspor Australia ke Indonesia yang belum dimanfaatkan sebesar 1 Milyar US\$. Apa yang menjadi target pemerintah dalam IA-CEPA sama sekali tidak dapat dibuktikan. Justru yang terjadi sebaliknya, potensi defisit Neraca Perdagangan Indonesia yang lebih besar akan terjadi. 2) Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2011-2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia tahun 2011-2022. Peningkatan IPM ini merupakan bukti kerja nyata pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Kerjasama Indonesia-Australia dalam membangun manusia Indonesia sudah lama terjadi bahkan sebelum adanya IA-CEPA. Kehadiran IA-CEPA yang bukan hanya sekedar perdagangan bebas, tetapi lebih kepada kerjasama yang komprehensif di segala bidang baik pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan lain-lain tentu akan berdampak pada IPM

Indonesia di masa depan. 3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia tahun 2011-2022 tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB Indonesia tahun 2011-2022, bahkan variabel ini juga boleh dikeluarkan dari model. IKLH Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, disisi lain PDB Indonesia dari tahun ke tahun juga meningkat. Kondisi ini mematahkan hipotesis Kurva Kuznets Lingkungan (kurva U terbalik), tapi lebih berbentuk hubungan linier. Artinya peningkatan PDB dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia pada periode waktu penelitian (2011-2022) tidak sampai mendegradasi lingkungan hidup. Kepedulian Australia terhadap kualitas lingkungan hidup Indonesia diwujudkan dengan membantu penghitungan, pengukuran dan penurunan emisi karbon dan emisi gas rumah kaca. Selain itu telah dicapai kesepakatan untuk penyelamatan hutan hujan di kawasan Asia-Pasifik. Kerjasama lainnya dalam hal pengelolaan gambut, mangrove, serta sampah plastik laut. 4) Secara simultan Neraca Perdagangan Indonesia-Australia, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia pada rentang waktu penelitian 2011-2022 berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB Indonesia. Jika ketiga variabel secara simultan mengalami peningkatan dan positif maka variabel PDB Indonesia juga akan mengalami peningkatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pembangunan Nasional Indonesia berkaitan dengan variabel Neraca Perdagangan Indonesia-Australia, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia setelah implementasi IA-CEPA, antara lain:

1. Memperbanyak penandatanganan *Free Trade Area* dengan negara mitra bukanlah solusi yang tepat jika kesiapan transformasi ekspor belum mendukung. Justru, dengan FTA tekanan perdagangan terhadap pembukaan pasar impor ke Indonesia semakin tinggi. Jika Pemerintah Indonesia tidak dapat mengelola impor dengan baik maka kinerja perdagangan akan sulit diperbaiki.
2. Dalam menyongsong IA-CEPA, seyogyanya Pemerintah Indonesia mempersiapkan skema antisipasi untuk mengantisipasi produk impor dari Australia terserap ke industri yang berorientasi domestik dan juga konsumsi rumah tangga yang berimbas melahirkan *trade off* pada produksi industri lokal.
3. Salah satu skema antisipasi produk impor dari Australia adalah dengan menyusun strategi *non-tarif measures* (NTMs) yang efektif, khususnya untuk sektor pertanian.

4. Kerjasama IA-CEPA di bidang pembangunan manusia Indonesia seyogyanya mulai mengalihkan perhatian kesenjangan sosial kepada wilayah Indonesia Timur.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis atau melakukan penelitian lebih lanjut, dapat mengembangkan model yang lebih baik dengan menambah variabel lain yang mempengaruhi Pembangunan Nasional Indonesia dan melihat pengaruhnya secara parsial maupun simultan dalam mempengaruhi Pembangunan Nasional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chapra, M. U. (2001). Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam. Gema Insani
- Eko Indrajit, *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM, 2006
- Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, p. 186
- Oktaviani, R., Amaliah, S., Ringler, C., Rosegrant, M.W., & Sulser, T.B. (2011)
- Silalahi, U. (2013). *Metode Penelitian Sosial* (4th ed.). PT. Refika Aditama
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2018, p. 224
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta

Jurnal

- Astari Marisa G., "Hubungan Bilateral Indonesia-Australia: Kepentingan Australia Dalam Meratifikasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement Tahun 2019", *TransBorders: International Relations Journal* 4, no. 1, 2020.
- Asuncion, C., R & Lee, M. (2017). *Impact of Sea Level Rise on Economic Growth in Developing Asia*. ADB Working Paper Series, No 507.
- Bahjatul Murtasidin, "Kepentingan Ekonomi Politik Indonesia dalam Kerjasama Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Australia", *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 4, no .1, 2021
- Danar Agus S., "Isu Standar Pada Perdagangan Indonesia-Australia Dalam Kerja Sama IACEPA", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan* 13, no. 1, 2019.
- Dicky Siswanto R. T., "Impelementasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 4, 2019, 216-222
- Mahadiansar, "Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia", *Jurnal Ilmu Administrasi* 17, no. 1, 2020, 77-92.

Artikel Website (daring)

The impact of global climate change on the Indonesian economy. IFPRI Discussion Paper 1148. Washington, D.C.: International Food Policy Research Institute.

Link: ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/12676

Free Trade Agreements Center, "IA-CEPA",

Link: <https://ftacenter.kemendag.go.id/ia-cepa>

Asean Briefing, "Indonesia and Australia Ratify IA-CEPA Agreement",

Link: <https://www.aseanbriefing.com/>

Ekonomi Bisnis, "Mulai Berlaku 5 Juli, Ini Manfaat IA-CEPA Bagi Indonesia",

Link: <https://ekonomi.bisnis.com>.

Enggartiaso, Siaran Pers Biro Hubungan Masyarakat,

Link: kemendag.go.id/berita/siaran-pers/indonesia-australia-masuki-babak-baru-hubungan-bilateral-perjanjian-dagang-ia-cepa-ditandatangani

Roberts, C. B., & Habir, A. D. (2015). Indonesia-Australia Relations: Progress, Challenges and Potential. London: Palgrave Macmillan,

Link: http://doi.org/https://doi.org/10.1057/9781137397416_10

Human Development Index, HDI Dimensions and Indicators, UNDP, 2023,

Link: <https://hdr.undp.org/>

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index),

Link: <https://jagostat.com/official-statistics/indeks-pembangunan-manusia>

Kurva Kuznets Lingkungan, link: <https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/environmental-kuznets-curve>

Regresi dan Uji Asumsi Klasik data time series,

Link: dimaschannel.com/2020/09/regresi-data-time-series-dan-uji-asumsi.html

Hendryadi, link: [Konstanta Negatif ..Bagaimana.htm](http://KonstantaNegatif..Bagaimana.htm)

Trade Map Adalah Solusi Ekspor Kian Tepat Sasaran,

Link: exporthub.id/trade-map-adalah-solusi-ekspor-kian-tepat-sasaran

Neraca Perdagangan Indonesia,

Link: satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/neraca-perdagangan-indonesia

Kedutaan Besar Australia,

Link: indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/SM13_017.html